

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berbicara mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat memang tidak akan ada habisnya. Seiring dengan menguatnya kesadaran masyarakat terhadap hal yang begitu penting seperti halnya kebutuhan ekonomi masyarakat menengah kebawah maupun masyarakat berkebutuhan khusus banyak aktivis sosial mulai ikut berperan dalam proses pembangunan. Keadaan tersebut membuka peluang bagi aktivis-aktivis sosial untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan berbasis komunitas atau kelompok masyarakat. Dengan menguatnya partisipatif ini secara tidak langsung mereka telah memperkuat kemampuan bangsanya sendiri untuk menghadapi dinamika perubahan pada lingkup regional maupun secara global.

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini sering ditafsirkan sebagai strategi pilihan dalam konteks pembangunan alternatif yang muncul sebagai reaksi model pertumbuhan konvensional dalam mengatasi problem kemiskinan, kelestarian lingkungan dan berbagai problem social yang mengimpit masyarakat. Sebagai bentuk pembangunan alternatif, pemberdayaan menekankan pada pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*) bersifat *bottom up* dan lokalitas. Pendekatan yang dipakai menekankan pada keadilan social yang berpihak pada kepentingan rakyat kecil yaitu mulai dari lokal, menyatu dengan budaya dan partisipatif dari masyarakat tersebut.¹

Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, tetapi juga untuk sarana rehabilitasi bagi masyarakat penyandang kebutuhan khusus, rasa percaya diri dan harga diri, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu pemikiran yang tidak dapat dilepaskan dari paradigma

¹ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat antara Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Prenada media group, 2013), hal. 140.

pembangunan yang berpusat pada rakyat. Setiap upaya pemberdayaan harus diarahkan pada penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat memiliki kehidupan yang lebih layak, dikhususkan bagi masyarakat berkebutuhan khusus yang dipandang sebelah mata bagi masyarakat umum.

Pemberdayaan sendiri merupakan upaya untuk membuat individu seseorang maupun kelompok mampu dalam mengurus kepentingannya secara mandiri. Pendekatan pemberdayaan paling efektif terletak pada faktor peningkatan ekonomi masyarakat secara umum. Dalam hal ini terdapat suatu bagian masyarakat yang benar-benar memerlukan pemberdayaan tersebut selain dari masyarakat menengah ke bawah ada juga masyarakat berkebutuhan khusus.

Sebelumnya pemberdayaan masyarakat berkebutuhan khusus ini fokus pada kegiatan pelatihan menjahit yang mulai pada tahun 2017. Kemudian dari pihak Dinas Sosial mulai mendirikan shelter khusus untuk tempat pelatihan bagi masyarakat berkebutuhan khusus yang disebut shelter Pengembangan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dalam shelter tersebut ada kelompok tersendiri yang menangani masyarakat disabilitas yang disebut Kelompok Usaha Disabilitas (KUD). Dinas Sosial sendiri mulai menambahkan pelatihan-pelatihan selain pelatihan menjahit yaitu seperti pelatihan batik gambar, batik ciprat motif yang diaplikasikan pada baju, selendang, sarung sampai pada masker.²

² Observasi di Shelter PPKS pada tgl 19 November 2020.

Dengan adanya shelter tersebut dari pihak Dinas Sosial mulai mendirikan kelompok-kelompok kecil di berbagai daerah di kabupaten Blitar, yaitu:

Tabel 1.1 Perbedaan Kategori Disabilitas pada Shelter dari Tiap Daerah

No.	Tempat	Keterangan
1	Garum	Disabilitas Intelek
2	Siraman	Dis XODGJ
3	Resap Ombo	Dis XODGJ
4	Soso	Dis XODGJ

Sumber: Observasi 19 November 2020

Dari data yang diperoleh tersebut peneliti memutuskan untuk mengambil data yang terletak di daerah Garum. Karena dari data yang telah diambil pada daerah selain Garum itu kebanyakan termasuk dalam kategori disabilitas xodgj yang mana jauh dari sehat. Sedangkan pada daerah Garum masyarakat disabilitasnya sudah bisa diajak bicara seperti orang normal lainnya. Dari keseluruhan daerah tersebut shelter di daerah Garum merupakan pusat dari yang lainnya, jadi walaupun tidak dipantau langsung oleh Dinas Sosial shelter yang terletak di daerah Garum sudah bisa mandiri dalam mengurus masyarakat disabilitas. Sedangkan untuk shelter yang ada di daerah Siraman, Resap Ombo, dan Soso sudah dikelola oleh warga sekitar daerah tersebut.³

Kesejahteraan sendiri dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009, menyebutkan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup secara material dan spritual yang

³ Observasi di Shelter PPKS pada tgl 19 November 2020.

⁴ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press 2005), 24.

layak, bertaqwa kepada Tuhan YME.⁵ Taraf kesejahteraan tidak hanya berupa ukuran yang terlihat (fisik dan kesehatan) tapi juga yang tidak dapat dilihat (spiritual).

Dalam indikator BKKBN keluarga yang sejahtera dapat memenuhi beberapa hal ini, diantaranya keluarga Sejahtera I *basic needs* atau kebutuhan dasar keluarga, keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator "kebutuhan psikologis" (*psychological needs*) keluarga, keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator "kebutuhan pengembangan" (*develomental needs*), Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (*self esteem*).⁶ Realita pada masyarakat secara umum penyandang disabilitas masih dipandang sebelah mata yang mana anggapan tersebut melihat bahwa penyandang disabilitas tidak bisa melakukan kegiatan seperti masyarakat yang lain. Namun kenyataannya sebagian anggota dari shelter PPKS ini sudah dalam kategori masyarakat sejahtera seperti halnya masyarakat lain, kecuali dalam hal ekonomi mereka masih kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan.⁷

Kemampuan memenuhi kebutuhan hak-hak dasar tersebut tercermin dalam *maqashid syariah* (objektivitas syariah). *Maqashid syariah* merupakan jalan untuk memenuhi tiga tahapan kebutuhan manusia, yakni *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Istilah *maqashid syariah* dipopulerkan oleh Asy-Syatibi yang tertuang dalam karyanya *Muwaffaqat* sebagaimana dalam ungkapan Bakri di jurnal Rohma Vihana: "*Inna haadzihizyari'atu wu dli'at litahqiqi maqosidissyaari'i qiyaami mashoolichifiddiini waddunyaa ma'an*". Artinya: "Sesungguhnya syariat ini (diciptakan) untuk meneguhkan tujuan-tujuan syariat (itu sendiri) untuk menegakkan kemaslahatan didalam agama dan dunia secara bersama-sama".⁸

⁵ Undang-Undang No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

⁶ Dini Puspita, Suparti, Yuciana Wilandari, Klasifikasi Tingkat Keluarga Sejahtera Dengan Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal Dan Fuzzy K-Nearest Neighbor (studi kasus Kabupaten Temanggung tahun 2013), *Gaussian*, 04 (2014), 646.

⁷ Wawancara dengan pengelola Shelter PPKS, 11 Juni 2021.

⁸ Rohma Vihana Enggardini, Kesejahteraan Karyawan Perspektif *Maqashid Syariah* Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao, *Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8 (Agustus, 2017), 601.

Pada bagian ini peneliti mengkaji dengan teori maqashid dikarenakan hal-hal seperti ini tidak diatur dalam kedua sumber utama hukum Islam yaitu Al-Quran dan as-Sunah. Dengan menjadikan konsep maqashid sebagai teori dasar pada penelitian ini agar umat Islam terdorong aktif, kreatif dan produktif dalam ikhtiar kehidupan ekonomi mereka. Selama tujuan hukumnya dapat diketahui, maka akan dapat dilakukan pengembangan hukum Islam berkaitan dengan upaya memajukan ekonomi demi kemaslahatan umat.

Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan ditetapkan hukum Allah adalah untuk kemaslahatan manusia. Adapun rincian indikator kesejahteraan menurut maqashid syariah yang diterapkan dalam buku-buku fiqh yang intinya ada lima yaitu: perlindungan terhadap agama (hifz al-din), memelihara jiwa (hifzh an-nafs), memelihara akal (hifzh al-aql), Memelihara harta (hifzh al-mal), dan Memelihara keturunan (hifzh an-nasb).⁹

Tabel 1.2

Anggota Penyandang Disabilitas Dilihat dari Tipe Kesejahteraan per-Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Anggota	Kesejahteraan
1	2017	20	kesejahteraan I
2	2018	55	kesejahteraan I dan II
3	2019	100-120	kesejahteraan II dan III
4	2020	150	kesejahteraan II-IV
5	2021	200£	kesejahteraan II-IV

Sumber: Wawancara dengan pengelola Shelter PPKS, 7 Agustus 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat penyandang disabilitas memiliki komunitas yang setiap tahunnya mengalami kenaikan anggota. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa setiap penyandang disabilitas banyak yang sudah dalam kategori keluarga sejahtera, yang mana kebanyakan dari

⁹ Rial Fuadi, *Ushul Fiqh* (Surakarta: FSEI Publishing 2013), 105-107.

setiap keluarga sudah ada yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Akan tetapi masih banyak dari penyandang disabilitas yang lain masih membutuhkan pelatihan dan pengawasan agar bisa hidup lebih mandiri.

Kesejahteraan masyarakat tidak pernah lepas dari masalah kemiskinan, karena pada dasarnya jika jumlah penduduk miskin berkurang maka secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat. Ketika pendapatan penduduk mulai meningkat maka akan mulai muncul lapangan-lapangan pekerjaan baru. Namun sebaliknya jika jumlah penduduk miskin meningkat maka dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebabnya karena pendapatan penduduk mengalami penurunan. Dengan demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dinas Sosial memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi di masyarakat, di dalamnya terdapat tugas pokok dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Dinas Sosial tersebut. Demi mencapai hasil yang maksimal dalam menjalankan sasaran kerja utama Dinas Sosial yaitu meningkatkan kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), maka ada pembagian bidang dalam Dinas Sosial. Beberapa bidangnya yaitu bidang pemberdayaan sosial, bidang penanganan fakir miskin, bidang perlindungan dan jaminan sosial dan bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial.

Dalam kegiatan memberdayakan masyarakat berkebutuhan khusus di sini Dinas Sosial menunjuk bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, sehingga selain menunjang perekonomian mereka juga dapat menambah kepercayaan diri mereka dalam bersosial pada masyarakat luas. Dinas Sosial juga menyediakan tempat bagi masyarakat berkebutuhan khusus tersebut yaitu shelter PPKS yang di dalamnya terdapat beberapa macam penyandang kebutuhan khusus seperti disabilitas, ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) dan lain sebagainya. Sehingga bagi para masyarakat berkebutuhan khusus setidaknya memiliki tujuan dan gambaran kedepan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis termotivasi melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas melalui Kerajinan Batik dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Ditinjau dari Maqashid Syariah (Studi pada Anggota Shelter PPKS Dinas Sosial Kabupaten Blitar)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah;

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas pada shelter PPKS melalui kerajinan batik?
2. Bagaimana pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas pada shelter PPKS melalui kerajinan batik dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat disabilitas?
3. Bagaimana Kesejahteraan masyarakat disabilitas ditinjau dari maqashid syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pemberdayaan ekonomi masyarakat berkebutuhan khusus pada shelter PPKS melalui kerajinan batik.
2. Mengetahui peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat penyandang disabilitas melalui pemberdayaan pada shelter PPKS melalui kerajinan batik.
3. Mengetahui kesejahteraan masyarakat disabilitas ditinjau dari maqashid syariah

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi peneliti lain dalam mengembangkan *research* tentang pemberdayaan ekonomi baik masyarakat secara umum ataupun masyarakat berkebutuhan khusus melalui kerajinan batik atau potensi lokal di pedesaan.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas terkait potensi lokal yang mampu menggerakkan ekonomi baik masyarakat secara umum ataupun masyarakat berkebutuhan khusus sehingga dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti menelusuri beberapa karya penelitian lain yang dapat dijadikan acuan, referensi dan perbandingan dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang telah ditemukan antara lain:

1. Penelitian oleh Jamaluddin.¹⁰ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana di Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera kota Kediri dengan melakukan perencanaan yang disusun oleh lembaga mengenai sasaran yang ditetapkan, dan program kerja yang akan dilakukan. Akan tetapi kesejahteraan nasabah belum optimal. Dikarenakan pembiayaan yang diterima nasabah tergolong kecil dan ada sebagian dari nasabah yang mengalihfungsikan digunakan untuk hal-hal non produktif. Sedangkan pengawasan/evaluasi dilakukan dengan dua kategori yaitu evaluasi secara internal dan eksternal. Sedangkan pengelolaan dana di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo kota Kediri dilakukan dengan mengatur sebuah perencanaan secara matang diantaranya mengenai sasaran dan program kerja. Akan tetapi kesejahteraan nasabah belum maksimal, dikarenakan kebijakan pengelolaan dana yang dapat disalurkan terbatas dan pembiayaan yang diterima nasabah tergolong kecil. Sehingga hal ini sulit bagi nasabah untuk mendapatkan suntikan tambahan modal usaha dalam jumlah banyak. Sementara bentuk pengawasan yang ada di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo adalah yang bersifat internal dan eksternal.

¹⁰ Jamaluddin, *Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah (Studi Kasus BWM Amanah Makmur Sejahtera dan BWM Berkah Rizqi Lirboyo Kota Kediri)*, Thesis.

Persamaan penelitian oleh Jamaluddin adalah sama-sama mengkaji pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan dari kedua penelitian ini yang mana penelitian terdahulu meneliti pada dua Bank Wakaf yang ada pada daerah tersebut. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini fokus pada masyarakat berkebutuhan khusus yang ada pada kelompok yang dibentuk oleh Dinas Sosial Kota Blitar.

2. Penelitian oleh Iin Sarinah, Aan Anwar Sihabudin dan Erlan Suwarlan.¹¹ Hasil dari penelitian Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi oleh Pemerintah Desa pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil wawancara, belum dilaksanakan dengan optimal, sesuai dengan indikator 5 (lima) program strategi pemberdayaan menurut Ismawan, hal ini diketahui dari 10 indikator yang diteliti hanya 3 yang dilaksanakan dengan baik dan sisanya 7 indikator belum dilaksanakan dengan baik.

Persamaan penelitian oleh Iin Sarinah dkk adalah sama-sama mengkaji mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat dan juga sama-sama memakai metode kualitatif. Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada objek penelitian yang mana peneliti terdahulu meneliti pada masyarakat secara umum. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini fokus meneliti pada masyarakat berkebutuhan khusus saja.

3. Penelitian oleh Uly Hikmah Andini, Mochamad Saleh Soeaidy dan Ainul Hayat.¹² Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi yang ada di Desa Muktiharjo dapat dilihat dari segi pertanian/ perkebunan, perikanan, pariwisata dan UKM. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dapat dilihat dari upaya pemerintah kabupaten sebagai perencana, fasilitator, pengawas dan evaluator. Pemeritah kecamatan sebagai fasilitator antara pemerintah kabupaten dan desa. Faktor pendukung yang

¹¹ Iin Sarinah, Aan Anwar Sihabudin dan Erlan Suwarlan, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran*, Jurnal MODERAT, Vol. 5, No. 3, Agustus 2019.

¹² Uly Hikmah Andini, Mochamad Saleh Soeaidy dan Ainul Hayat, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 12. (2015).

ada meliputi sumber daya alam melimpah dari sektor pertanian dan sumber daya manusia yang melimpah, globalisasi dan kemajuan teknologi yang mempengaruhi bidang pertanian, perikanan, pariwisata dan UKM. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terbatasnya modal, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat yang rendah.

Persamaan penelitian oleh Uly Hikmah Andini dkk adalah sama-sama mengkaji tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada objek penelitian, yang mana pada penelitian terdahulu meneliti kelompok masyarakat dari satu daerah. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini fokus meneliti pada individu masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus.

4. Penelitian oleh Dewita Harthanti, Linda Kusuma Tani, dan Huldiya Syamsiar.¹³ Hasil dari penelitian ini menunjukkan dengan adanya strategi pemberdayaan masyarakat inklusi di SMP 4 Selong, mengakibatkan anak-anak berkebutuhan khusus cukup memiliki ketahanan sosial yang baik. Hal ini dibuktikan dengan pergaulan antara siswa-siswi berkebutuhan khusus dengan siswa siswi reguler lainnya berjalan dengan baik. Siswa siswi berkebutuhan khusus tetap memiliki kepercayaan diri untuk berbaur dengan siswa lainnya, tetap mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan sekolah.

Persamaan penelitian oleh Dewita Harthanti dkk adalah sama-sama mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus dan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada fokus penelitian, yang mana pada penelitian terdahulu meneliti strategi dari pemberdayaan masyarakatnya. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini fokus meneliti pada pemberdayaan masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus.

¹³ Dewita Harthanti, Linda Kusuma Tani, dan Huldiya Syamsiar, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Inklusi Berbasis Ketahanan Sosial*, Jurnal EducatiO Vol. 10 No. 1, Juni 2022, hal. 84.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasannya, secara teknis mengacu pada buku pedoman penulisan tesis yang terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama/ inti, dan bagian akhir.

Bagian awal tesis memuat beberapa halaman terletak pada sebelum isi halaman yang memiliki beberapa bagian, pada bagian awal ini meliputi: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, abstrak, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan pedoman transliterasi huruf Arab-Latin.¹⁴

Bagian inti tesis memuat beberapa bab dengan format (susunan/sistematis) penulisan disesuaikan pada karakteristik pendekatan penulisan kualitatif. Dan ketiga bagian akhir tesis meliputi daftar rujukan, lampiran-lampiran yang berisikan lampiran foto atau dokumen-dokumen lain yang relevan, dan daftar riwayat hidup penulis.

Pada bagian inti tesis ini terdiri dari enam bab, dimana satu bab dengan bab lain ada keterkaitan dan ketergantungan secara sistematis, dengan kata lain pembahasannya berurutan dari bab pertama hingga ke enam. Adapun sistematika pembahasan tesis ini sesuai dengan penjabaran sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan, yang berisikan tentang Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua memuat Kajian Pustaka. Dimana kajian ini meliputi tiga sub bab: sub bab pertama membahas tentang Pemberdayaan: Pengertian Pemberdayaan, Konsep Pemberdayaan, Tujuan Pemberdayaan, Sistem dan Strategi Pemberdayaan. Sub bab kedua membahas tentang Kesejahteraan Ekonomi: Pengertian, Konsep Kesejahteraan dalam Islam dan Indikator Kesejahteraan. Sedangkan sub bab ketiga membahas tentang Penyandang Disabilitas: Penyandang Cacat, Orang Berkebutuhan Khusus, Penyandang Ketunaan, dan Penyandang Disabilitas.

¹⁴ Pedoman Penulisan Tesis Dan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2018, *Pedoman Penulisan Tesis.*, 35.

Bab Ketiga berisi Metode Penelitian yang meliputi Jenis dan Pendekatan Penelitian, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Pengecekan Keabsahan Data, Teknik Analisa Data.

Bab keempat tentang laporan hasil penelitian yang terdiri dari dua bagian, pertama yaitu Paparan Data Penelitian yang berisikan tentang: Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Shelter PPKS Dinas Sosial dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Penyandang Disabilitas. Sedangkan bagian kedua yaitu tentang temuan penelitian yang meliputi: Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Penyandang Disabilitas melalui Kerajinan Batik.

Bab kelima membahas tentang hasil penelitian dengan cara penelusuran titik temu antara teori yang sudah dipaparkan di bab satu dan bab dua yang kemudian dikaitkan dengan hasil penemuan penelitian yang merupakan realitas empiris bab empat dengan menggunakan analisa pencarian makna sesuai dengan bab tiga. Adapun yang difokuskan dalam pembahasan dibab ini meliputi: Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas melalui Kerajinan Batik dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Bab keenam adalah penutup yang berisikan kesimpulan, implikasi dan saran-saran atau rekomendasi.